



Peran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Renita Rachel Elizabeth Voll¹, Muhammad Adzkiya Azam²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

Abstrak

Received: 01 Juli 2024

Revised: 08 Juli 2024

Accepted: 15 Juli 2024

The transformation of public administration is crucial in facing the demands of developments in information technology. This article examines the strategic role of the Semarang Regency Communication and Information Department in implementing an Electronic-Based Government System as an extension of the e-government concept. Through a descriptive qualitative approach, this research examines the concrete steps taken by the Communication and Information Department in adopting technology to restructure work processes, provide bureaucratic efficiency, and promote active community involvement. The implications of these findings provide insight into how Electronic-Based Government Systems are not only information and communication technology solutions, but also as catalysts for fundamental transformation so that public administration can be implemented efficiently and adaptively. The result of these findings is the need for massive outreach to the community for the implementation of an Electronic-Based Government System so that it can run optimally.

Keywords: *Electronic Government, E-Government, Public Administration*

(*) Corresponding Author: rachelizaav@e-mail.com

How to Cite: Voll, R. R. E., & Azam, M. A. (2024). Peran Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803398>.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi telah membawa perubahan mendasar dalam cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain. Era digital memperkenalkan cara baru kepada masyarakat untuk dapat memperoleh informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi menjadi penggerak kehidupan yang tidak terelakkan dalam membentuk dinamika sosial yang memfasilitasi konektivitas tanpa batas.

Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik, 62,10 persen penduduk Indonesia yang mengakses jaringan internet pada tahun 2021 dan meningkat ke angka 66,48 persen di tahun 2022. Peningkatan jumlah pengguna internet dari tahun ke tahun ini menunjukkan pesatnya penerimaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan komunikasi. Jaringan internet menjadi sumber pengetahuan yang tidak terbatas, memberikan akses cepat dan mudah ke berita terkini, riset, dan konten edukatif serta memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam komunitas virtual.

Transformasi pemerintahan melalui penerapan teknologi dan komunikasi menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Sebagai upaya menuju pemerintahan



yang lebih efisien dan terintegrasi, Indonesia menghadapi peralihan signifikan dari model pemerintahan konvensional ke bentuk pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintahan elektronik atau *e-government* merupakan konsep yang mengadopsi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Konsep ini mencakup penggunaan platform daring, basis data integrasi, dan layanan publik yang dapat diakses secara elektronik dengan melibatkan keterlibatan aktif masyarakat.

Komponen utama yang terdapat dalam pemerintahan elektronik secara garis besar dapat ditarik menjadi beberapa hal berikut 1. Layanan elektronik (*e-services*) yang menawarkan akses layanan publik secara daring, mulai dari pembuatan dokumen hingga perizinan usaha. Melalui portal elektronik, masyarakat dapat mengajukan permohonan, mengakses informasi, dan berinteraksi dengan pemerintah tanpa harus datang secara fisik ke kantor-kantor pelayanan 2. Manajemen Elektronik (*e-management*) yang merupakan sistem manajemen elektronik membantu pemerintah dalam pengelolaan administrasi internal, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan logistik. Ini mempercepat proses pengambilan keputusan, meningkatkan akuntabilitas, dan mengurangi birokrasi 3. Partisipasi Elektronik (*e-participation*) yang mendorong partisipasi aktif masyarakat. Melalui platform daring, warga dapat menyampaikan pendapat, memberikan masukan, dan terlibat dalam dialog dengan pemerintah untuk menciptakan hubungan yang lebih demokratis.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sebagai fasilitator dalam penyelenggaraan pemerintahan elektronik memegang peran penting dalam membentuk dan mengembangkan teknologi yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten Semarang. Lembaga ini bertanggungjawab untuk mengimplementasikan dan mengelola pelayanan melalui teknologi. Solusi inovatif yang diciptakan untuk memaksimalkan pemanfaatan jaringan digital adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang merupakan program ekstensif dari konsep *e-government*. Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi landasan hukum yang jelas dan komprehensif untuk memandu peralihan *e-government* menuju model yang lebih holistic dan terintegrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas timbul pertanyaan penting tentang bagaimana langkah-langkah strategis yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mencapai pemerintahan yang efisien, transparan, dan terintegrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

E-government

Menurut Clay G. Weslatt (15 Agustus 2007) dalam website, E-Government adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian fasilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. hal ini dilakukan untuk merubahnya sistem pemerintahan

yang sebelumnya menggunakan tradisi lama atau manual agar berganti ke elektronik, namun perbedaan pendapat dengan Dr. Richardus Eko Indrajit dalam bukunya yaitu E-Government In Action yang dimana menurut ia menguraikan E-Government adalah suatu usaha menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama (Shared goals) dari sejumlah komunitas yang berkepentingan, oleh karena itu visi yang dicanangkan juga harus mencerminkan visi bersama dari pada stakholder. Tak hanya tentang merubah pemerintahan untuk menjadi berbasis elektronik tapi juga harus sesuai dengan objektif bersama dengan komunitas yang berkepentingan.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Menurut Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 untuk menunjang perubahan kepada era digitalisasi itu sendiri yang dimana SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan pada Pengguna SPBE. Yang dimana dengan program SPBE ini akan menjadikan pemerintahan yang berbasis elektronik kedepannya. Selain itu menurut Kementerian Hukum dan Ham Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau yang biasa disebut dengan e-government adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat, dan pihak-pihak lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa program SPBE ini tidak hanya untuk pemerintah saja, namun untuk seluruh lapisan warga negara Indonesia.

Smart City

Menurut Caragliu et al (2011) *smart city* merupakan kota yang menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, serta sarana prasarana telekomunikasi yang dimaksudkan untuk memajukan ekonomi yang terus menerus, kehidupan yang maju, dan pengelolaan sumber daya yang bijak serta melibatkan pemerintahan di dalamnya. Selanjutnya Kourtit & Nijkamp (2013) melakukan penelitian untuk bahwa kinerja kota sangat berperan untuk terjadinya evolusi perubahan pada kota tersebut. Dan ia menyimpulkan bahwa *smart city* adalah kota yang sangat terpengaruh dari ilmu yang sudah berkembang dari sisi ekologi serta sosial ekonomi yang mengalami persaingan di dalamnya. Yang pada akhirnya *smart city* terbentuk dikarenakan perpaduan sumber daya alam manusia, infrastruktur yang memadai, komunitas yang ikut ambil peran dalam membangun, munculnya bisnis yang kreatif dan pemerintahan yang unggul serta terbuka yang pada akhirnya menghasilkan produknya yaitu *smart city*.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan perolehan informasi melalui wawancara dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Data dan Informasi yang diperoleh kemudian dijabarkan secara deskriptif untuk menjelaskan permasalahan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam transformasi model pemerintahan konvensional ke Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang memegang peran sentral sebagai fasilitator dalam pengintegrasian teknologi ke dalam sistem pemerintahan. Berikut adalah hasil pembahasan mengenai langkah-langkah konkret yang telah diambil:

Ketersediaan Layanan 24 Jam

Dalam era di mana masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap ketersediaan informasi dan layanan 24 jam, inisiatif Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin terkoneksi dan membutuhkan akses instan terhadap layanan pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang menunjukkan dedikasinya terhadap pelayanan yang tidak terputus dengan menyediakan jaringan standby selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini berarti infrastruktur jaringan, server, dan sistem lainnya tetap aktif dan siap digunakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat kapan pun dibutuhkan. Ketersediaan jaringan 24 jam memungkinkan respons yang cepat terhadap kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Baik itu untuk mendukung operasional pemerintahan, menyediakan informasi penting kepada masyarakat, atau mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul, layanan yang dapat diandalkan sepanjang waktu menjadi kunci dalam mendukung keberlanjutan pelayanan publik.

Implementasi Platform Digital

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang telah mengambil langkah-langkah proaktif dalam merancang dan mengimplementasikan platform digital berupa aplikasi sebagai basis utama dalam peralihan ke SPBE. Melalui portal resmi dan aplikasi yang dikembangkan, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan publik, mengajukan permohonan secara daring, serta memperoleh informasi yang diperlukan. Dengan menerapkan aplikasi sebagai platform digital, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi pada peningkatan aksesibilitas layanan publik. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi, mengajukan permohonan, dan berinteraksi dengan pemerintah melalui perangkat mobile mereka, menciptakan pengalaman yang lebih efisien dan ramah pengguna. Aplikasi tidak hanya memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dengan lebih mudah, tetapi juga memberikan keuntungan efisiensi bagi pemerintah dalam mengelola dan menyediakan layanan tersebut. Proses administratif dapat dipercepat.

Manajemen Data yang Efisien

Dalam rangka merestrukturisasi proses kerja, dinas ini fokus pada pengembangan sistem manajemen data yang efisien. Strategi utama yang diadopsi adalah penyusunan basis data terpusat. Salah satu tujuan utama dari pengembangan basis data terpusat adalah memungkinkan integrasi informasi di seluruh sektor

pemerintahan. Ini menciptakan keselarasan dan koordinasi antara berbagai departemen dan lembaga, menghindari duplikasi data, dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan dapat diakses dengan cepat dan tepat.

Pelibatan Masyarakat Melalui Media Sosial

Langkah penting yang diambil adalah memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan keterlibatan aktif masyarakat. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang secara proaktif menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi. Media sosial mencakup platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya yang memungkinkan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Selain sebagai alat untuk berkomunikasi, media sosial juga digunakan untuk mempromosikan program dan inisiatif pemerintah. Kampanye, kegiatan sosial, atau program pendidikan dapat lebih mudah diinformasikan dan didukung oleh masyarakat melalui berbagai platform media sosial. Melibatkan masyarakat melalui media sosial juga berkontribusi pada peningkatan transparansi pemerintah. Dengan memberikan informasi secara terbuka, memberikan penjelasan terkait kebijakan, dan merespons pertanyaan atau kritik dari masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan terbuka.

Pelatihan dan Penyuluhan

Dalam rangka memastikan bahwa peralihan ke SPBE diadopsi dengan baik oleh seluruh sektor, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang juga memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada pegawai pemerintah dan masyarakat umum. Ini termasuk pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan teknologi, serta pelatihan karyawan untuk mengelola dan memanfaatkan sistem baru.

Namun, dalam implementasinya terdapat beberapa kendala terhadap penerapan SPBE antara lain:

Awareness and Trust

Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pemerintahan digital karena telah terbiasa dengan cara-cara yang konvensional sehingga dibutuhkan waktu yang panjang untuk beradaptasi dengan pola baru khususnya kepada masyarakat dalam rentang umur dewasa ke lansia. Serta masalah kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik untuk menyimpan datanya untuk didigitalisasi. Kedua masalah ini menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam penerapan pemerintahan elektronik.

Assist

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang tentu ingin membuat misi mereka terealisasi dengan baik dan lancar, hal tersebut dilihat dengan adanya Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah tentang *e-government*, namun pada pelaksanaannya kurang maksimal karena kurangnya bantuan dari pejabat publik serta kurangnya pemahaman tentang *e-government* untuk merealisasikan program tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik khususnya di Kabupaten Semarang sudah cukup optimal walau belum sempurna. Langkah-langkah yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang telah berhasil mengembangkan teknologi yang dibutuhkan masyarakat Kabupaten dengan mengimplementasikan dan mengelola pelayanan melalui teknologi komunikasi dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Bimasakti, Firman. (2017). Tatakelola Pemerintah Berbasis *Electronic Government* di Kabupaten Semarang. Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP UNDIP.
- Putri Intan Olivia Nadila, Warsono Hadi. (2018). Manajemen *Electronic Government* di Kabupaten Semarang. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.
- Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Sa'bani Anas, Nurhayati Tri, Susilo Budi Adi. (2019). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pendukung Perkembangan Ekonomi Daerah Kabupaten Semarang. Fakultas Hukum Universitas Ngudi Waluyo.